

KONTROL NEGARA OTORITARIAN ATAS MEDIA: PEMBATASAN KEBEBASAN PERS DI MYANMAR PASCA KUDETA MILITER

Hassya Talitha Nur Mahsa¹, Aswin Ariyanto Azis²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email Korespondensi: hassyatalithanm@gmail.com, a.azis@ub.ac.id

Submitted: 14-09-2025; Accepted: 26-11-2025; Published : 05-12-2025

ABSTRAK

Kudeta militer Myanmar pada Februari 2021 memicu kembalinya rezim otoritarian yang secara sistematis membatasi kebebasan pers. Penelitian ini menganalisis strategi kekuasaan junta dalam mengontrol informasi melalui kriminalisasi jurnalis, penutupan media independen, sensor digital, serta penyebaran propaganda pro-pemerintah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis dalam artikel ini dilakukan menggunakan kerangka otoritarianisme untuk menjelaskan represi informasi sebagai instrumen stabilitas semu, serta teori hegemoni Gramsci untuk memahami konstruksi legitimasi melalui dominasi ideologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pers di Myanmar bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia, tetapi merupakan strategi terencana untuk mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi represi koersif dan manipulasi narasi publik. Selain itu, perlawanan masyarakat melalui media alternatif dan kampanye digital global mengungkap rapuhnya hegemoni militer yang sangat bergantung pada tindakan represif. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana rezim otoriter kontemporer memadukan kontrol media dan otoritarianisme digital untuk mempertahankan dominasi politik.

Kata kunci: Kebebasan Pers, Kudeta Militer Myanmar, Pembatasan Media, Otoritarianisme Digital, Hegemoni.

ABSTRACT

The military coup in Myanmar on February 2021 marked the resurgence of an authoritarian regime that systematically restricts press freedom. This study analyzes the junta's strategies in controlling information through the criminalization of journalists, the shutdown of independent media, digital censorship, and the dissemination of pro-government propaganda. Using a qualitative, literature-based approach, the article applies authoritarianism theory to explain information repression as an instrument for constructing a false sense of stability, and Gramsci's theory of hegemony to understand how ideological domination is used to legitimize military rule. The findings show that restrictions on press freedom in Myanmar are not merely human rights violations but a deliberate strategy to maintain power through a combination of coercive repression and narrative manipulation. In addition, societal resistance supported by alternative media and global digital campaigns reveals the fragility of the military's hegemony, which depends heavily on coercive measures. This article provides insight into how contemporary authoritarian regimes integrate media control and digital authoritarianism to sustain political dominance.

Key word: Freedom of the Press, Myanmar Military Coup, Media Restrictions, Digital Authoritarianism, Hegemony.

PENDAHULUAN

Historis ketegangan panjang pemerintahan Myanmar mulai menemui titik puncaknya ketika kudeta militer yang

menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi terjadi pada Februari 2021. Aung San Suu Kyi diusung oleh partai National League for Democracy merupakan kandidat yang

mendapatkan kemenangan telak pada pemilu 2020, akan tetapi kemenangannya ditentang oleh partai oposisi Union Solidarity and Development Party yang didukung oleh militer (Ashadi, 2022). Ketegangan antara militer dan Aung San Suu Kyi sudah terbangun sejak lama, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan militer, termasuk sikap Aung San Suu Kyi terhadap isu etnis Rohingya yang dapat terbilang kontroversial. Sebagai respons, junta militer menahan Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin lainnya, mengakhiri periode transisi menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011. Kudeta militer ini mengakhiri harapan untuk demokrasi yang mulai tumbuh di Myanmar dan mengembalikan negara tersebut ke dalam cengkeraman kekuasaan militer dan menandai kembalinya kekuasaan militer di Myanmar, yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam politik negara, serta memicu protes besar di seluruh negeri yang menuntut pengembalian demokrasi (Ashadi, 2022). Keadaan ini tidak hanya menambah penderitaan rakyat Myanmar, tetapi juga mengundang perhatian internasional terhadap dampak krisis kemanusiaan yang seringkali ditimbulkan (Indrasari et al., 2023).

Setelah kudeta, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers terjadi secara drastis. Lalu, militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, mereka tidak hanya menghentikan jalannya pemerintahan sipil, tetapi juga mulai menghalangi rakyat Myanmar untuk menyuarakan pendapat mereka yang digaungkan melalui protes dan demonstrasi. Namun, alih-alih mendengarkan pihak junta militer membalas protes tersebut dengan tindakan represif. Misalnya dalam beberapa insiden, seperti pembunuhan terhadap Mya Thwe Thwe Khaing, seorang pengunjuk rasa wanita berusia 20 tahun yang ditembak oleh polisi, dan banyak lainnya yang tewas akibat tembakan militer, jelas menunjukkan bahwa kebebasan berbicara telah ditekan dengan cara yang sangat kejam (Bahri, 2022). Kebebasan berpendapat bukan sekedar hak untuk mengungkapkan pendapat, tetapi juga pilar utama yang mendukung hak asasi manusia dan demokrasi (Gunawan et al., 2021). Selain itu, pemerintah militer Myanmar juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi dengan

memblokir media dan internet. Ini semakin memperparah pelanggaran kebebasan, karena rakyat tidak hanya dilarang untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga dilarang mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk membentuk pendapat yang bersifat informasional. Ketika hak ini dibungkam, seperti yang terjadi di Myanmar, maka rakyat kehilangan kemampuan mereka untuk menuntut keadilan.

Meskipun penelitian mengenai kudeta militer Myanmar telah banyak dilakukan dan sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada aspek kronologi peristiwa, dinamika politik, dan pelanggaran HAM. Dengan begitu, kesenjangan literatur terlihat masih belum ada kajian yang secara eksplisit membahas pembatasan media dan kebebasan pers yang dihubungkan dengan kerangka otoritarianisme dan hegemoni untuk menjelaskan bagaimana adanya represi informasi tidak hanya timbul sebagai respon kontekstual, tetapi sebagai strategi politik. Oleh karena itu, kajian ini belum banyak dibahas secara spesifik dan belum memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana kontrol informasi digunakan secara terencana sebagai strategi mempertahankan kekuasaan.

Melihat kajian sebelumnya terdapat pembahasan yang menjelaskan kronologi kudeta dan dampaknya ditinjau dalam pendekatan hukum internasional (Triadi & Lubis, 2025). Lalu terdapat kajian yang menyoroti dinamika politik internal dan transisi demokrasi pasca kudeta (Firmas & Rizky, 2023). Sementara itu, kajian lainnya menyoroti pada pembahasan pelanggaran HAM pada masyarakat sipil dan respon ASEAN dalam menangani konflik kudeta militer (Susanto et al., 2023). Terdapat pula artikel yang mengkaji krisis kemanusiaan, dampaknya terhadap keamanan manusia, dan peran ASEAN dalam menangani krisis tersebut (Novia, 2025). Dengan demikian, tulisan artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan ruang penelitian guna memahami pembatasan kebebasan media dan pers di Myanmar.

Dalam konteks ini, otoritarianisme dijelaskan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara otoriter seseorang dan ancaman yang dirasakan di masyarakat. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa otoritarianisme tidak hanya merupakan karakteristik kepribadian yang statis, tetapi

dapat diaktifkan dan diperkuat oleh kondisi ancaman tertentu, seperti ancaman politik, sosial, atau ekonomi. Otoritarianisme mencerminkan kebutuhan akan keteraturan, kontrol, dan kepatuhan terhadap otoritas, terutama dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian atau ancaman. Individu cenderung menunjukkan sikap intoleransi dan stereotip terhadap kelompok luar atau minoritas ketika mereka merasa dunia di sekitar mereka tidak stabil atau terancam (Linz, 2000). Misalnya, ancaman politik, seperti keberadaan ideologi yang dianggap bertentangan, atau ancaman sosial, seperti perubahan norma budaya, dapat memicu respons otoritarian. Tingkatan otoritarianisme tidak berubah secara langsung dengan adanya ancaman, akan tetapi manifestasi perilaku seorang otoriter meningkat, misalnya seseorang 'otoriter' kan lebih mungkin mendukung hukuman mati atau kebijakan keras (Feldman & Stenner, 1997).

Adapun hegemoni berasal dari kata Yunani "hegemonia" merujuk pada dominasi satu aktor dalam sistem baik itu negara maupun kekuatan non-negara. Konsep ini mencakup kemampuan untuk mengarahkan sistem internasional melalui pengaruh politik, ekonomi, militer, dan budaya. Kekuasaan hegemonik tidak hanya bergantung pada kekuatan militer tetapi juga pada kemampuan membangun konsensus melalui dominasi ideologis. Hal ini memungkinkan hegemon untuk menciptakan tatanan global yang terlihat alami dan tidak dapat diubah, padahal sebenarnya tatanan tersebut dibentuk untuk mempertahankan kepentingan negara atau kelompok yang dominan. Hegemoni juga terkait dengan kemampuan untuk mengubah aturan dan norma internasional sesuai dengan kepentingannya menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan koersif dan daya tarik ideologis untuk mempertahankan dominasi dalam sistem internasional (Yilmaz, 2010). Tertuang dalam tulisan Thomas R. Bates mengenai Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa keberlangsungan kekuasaan suatu kelas sosial, terutama kelas penguasa, membutuhkan lebih dari sekadar kontrol langsung melalui kekuatan militer atau hukum. Hegemoni menurut Gramsci bekerja melalui dua elemen utama dalam masyarakat, yakni keberlangsungan masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil

mencakup institusi-institusi seperti sekolah, gereja, media, dan organisasi sosial lainnya yang membentuk kesadaran dan nilai-nilai individu. Di sisi lain, masyarakat politik melibatkan institusi negara seperti polisi, pengadilan, dan tentara yang menjalankan dominasi melalui paksaan jika diperlukan. Namun, hegemoni tidak bersifat selamanya, karena ketika terjadi krisis hegemonik, misalnya karena kegagalan kebijakan atau perpecahan internal, kelas penguasa terpaksa mengandalkan kekuatan koersif untuk mempertahankan kontrol. Gramsci menyebut periode ini sebagai masa transisi yang berbahaya, di mana peluang untuk transformasi sosial muncul jika kelas revolusioner dapat menciptakan hegemoni baru (Bates, 1975).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pasca kudeta militer Myanmar. Fokus utama penelitian adalah dinamika sosial terkait pembatasan kebebasan pers, serta upaya rezim militer dalam melakukan tindakan represif terhadap media. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga berusaha mengungkap makna di baliknya, dengan menelaah narasi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Fenomena yang dianalisis meliputi pembungkaman media, intimidasi terhadap jurnalis, serta penyebaran propaganda yang digunakan untuk membentuk opini publik (Nasution, 2023).

Pengambilan data dalam penelitian ini dimulai dari Februari 2021, tepat setelah kudeta militer di Myanmar hingga saat artikel ini ditulis. Hal ini dipilih karena pada saat kudeta militer Myanmar terjadi di tahun 2021 tersebut menjadi titik balik dan mengawali terjadinya serangkaian dinamika represifitas dan pembatasan media serta pers. Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana rezim militer Myanmar menggunakan kontrol informasi untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, data penelitian diperoleh melalui data sekunder, yang mencakup berita, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen resmi, serta publikasi organisasi pemantau kebebasan pers. Sumber-sumber yang digunakan antara lain laporan *Freedom House* terkait kebebasan digital Myanmar, laporan *Reporters Without*

Borders, laporan *Committee to Protect Journalists*, serta artikel analitis dari VOA, The Guardian, The Irrawaddy, ICNL, dan media berita akurat lainnya. Sumber tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi media, kebijakan represif junta militer, serta situasi jurnalis pasca kudeta.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi literatur, dengan menelusuri berbagai laporan mengenai penangkapan jurnalis, penutupan media independen, penyebaran propaganda negara, serta pembatasan akses informasi yang dilakukan junta militer. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui kajian teks dan wacana untuk melihat bagaimana media dan dokumen membentuk narasi, termasuk cara propaganda digunakan untuk membenarkan tindakan represif dan mengendalikan opini publik. Analisis ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana junta membentuk narasi tunggal untuk menjustifikasi tindakan mereka, sejalan dengan kerangka otoritarianisme dan hegemoni guna menganalisis dan mengungkap bagaimana narasi tunggal dibentuk oleh rezim untuk justifikasi kekuasaan mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka teori kekuasaan, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kontrol informasi digunakan oleh rezim militer Myanmar untuk mempertahankan legitimasi mereka di mata masyarakat.

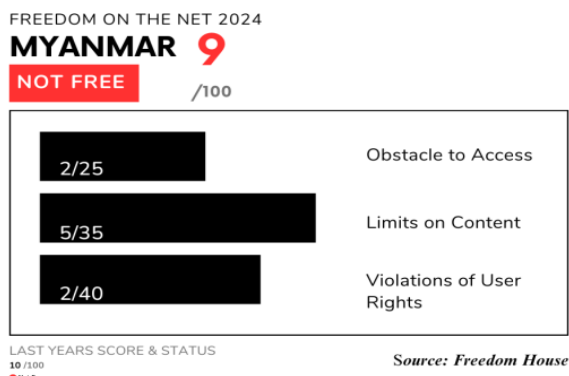
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak peristiwa kudeta militer Myanmar yang mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 mengakibatkan munculnya situasi kemunduran sekaligus resistensi hak asasi manusia dan kebebasan pers, di mana wartawan, aktivis, hingga warga sipil bersuara mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berupa kekerasan ekstrim dengan penahanan, penyiksaan, bahkan kematian. Militer Myanmar menggunakan metode ala represif lama, timbal balik masyarakat adalah merespon dengan berbagai bentuk perlawanan, seperti protes jalanan, mogok kerja, menahan pembayaran pajak, memukul panci dan wajan sebagai simbol

protes, hingga tidak berpartisipasi dalam acara sosial dan keagamaan yang diadakan oleh badan penegak hukum. Terlihat dalam sembilan bulan pertama, hampir sebanyak 9.000 orang ditangkap dan lebih 1.000 korban meninggal dunia, dengan dalih junta militer menutupi menggunakan alasan ‘keamanan nasional’ untuk menargetkan para pembangkang dengan ribuan surat penangkapan (Myanmar, 2022).

Masyarakat Myanmar bergerak dengan melakukan pemberontakan dan perlawanan didukung dengan gerakan independen seperti NUG (National Unity Government) dan PDF (People’s Defence Force). Di sisi lain, junta militer berusaha mengendalikan informasi dengan membatasi media independen dan menyebarkan propaganda melalui saluran resmi agar tidak menjadi perhatian publik. *Ministry of Information* atau MoI melakukan pelarangan terhadap media yang menyebut pihak junta sebagai “*Coup Council*” dan mengancam dengan mencabut izin media yang dianggap memprovokasi, melakukan tindakan strategi kontra, yakni membatasi media independen dan mendirikan saluran alternatif untuk menyebarkan konten yang disponsori oleh negara yang bersisi pesan sebaran ancaman terhadap kelompok oposisi. Maksud dari penegasan penyebutan coup council agar masyarakat percaya bahwa tujuan militer bukanlah melakukan kudeta, melainkan campur tangan dalam urusan negara karena dugaan ketidakteraturan pemilu. Tindakan tersebut membuat kebenaran semakin sulit terungkap, terlebih lagi jurnalisme yang berani di Myanmar menjadi semakin langka dan profesi dengan risiko tinggi (Khine, 2021).

Pembatasan dan Pengawasan di Myanmar



Gambar 1. (Sumber Freedom House)

Hak kebebasan di Myanmar mengalami disrupsi setelah terjadinya kudeta militer, seringkali masyarakat sipil terkena pengaruh masif akibat dari ketegangan kudeta militer yang menyebabkan mereka tidak bisa berkutik atau bahkan mengungkapkan segilintir perasaan mengenai kebebasan hingga pencapaian perjuangan dalam demokrasi. Namun, selain masyarakat terdapat pihak media yang justru ikut dibungkam keberadaannya karena menyuarakan kebenaran atas kondisi aktual yang telah terjadi. Dilansir melalui pernyataan media (Freedom House, 2024), pemerintah militer yang kini berkuasa melakukan berbagai langkah represif untuk menekan kebebasan informasi. Salah satunya adalah dengan memblokir akses internet secara lokal dan menaikkan harga data, sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, termasuk mengorganisir perlawanan terhadap pemerintah. Bahkan, beberapa platform media sosial seperti WhatsApp, X, dan Instagram dibatasi pada Mei tahun 2024, sementara banyak aplikasi VPN yang sering digunakan untuk mengakses informasi dari luar Myanmar juga diblokir. Dalam beberapa kasus, militer menangkap dan menghukum orang-orang hanya karena mereka menggunakan aplikasi VPN atau berbagi informasi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Di tengah semua ini, media yang berusaha memberi laporan independen dan berbicara tentang kondisi yang terjadi di Myanmar juga tak luput dari ancaman. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Kementerian Informasi Myanmar meluncurkan platform video lokal bernama MTube yang berfungsi sebagai pengganti YouTube, dengan tujuan menyiarkan konten yang dikendalikan negara. Ini menunjukkan upaya besar dari pihak militer untuk mengontrol informasi yang diterima oleh publik dan membungkam suara-suara yang menentang mereka (MT News, 2022).

Banyak media independen ditutup atau memilih untuk mengasingkan diri karena tekanan militer yang menuntut mereka menghentikan liputan kritis. Para jurnalis dihadapkan pada ancaman peringatan dan tuntutan untuk menghapus konten yang

dianggap merugikan pemerintah, bahkan melarang penggunaan kata-kata seperti "rezim" dan "junta". Media besar seperti 7DayDaily memilih untuk menghapus situs mereka, sementara penyensoran diri semakin meningkat, dengan banyak jurnalis yang memilih diam demi keselamatan mereka. Militer juga membatasi akses ke sumber informasi independen, memblokir situs web dan platform media sosial yang tidak disetujui, serta meluncurkan saluran media palsu untuk mendukung pemerintah. Mereka juga menyebarkan disinformasi dengan menandai konten media independen sebagai "berita palsu". Dalam situasi ini, banyak media yang bergantung pada wartawan warga yang kurang terlatih dan tidak memiliki dukungan yang cukup untuk melaporkan situasi dengan aman. Hal ini semakin memperburuk ketidakpastian, karena risiko bagi para jurnalis semakin tinggi, dan kebebasan informasi semakin terancam (Freedom House, 2024).

Berdasarkan data yang ditampilkan, kebebasan internet di Myanmar pada tahun 2024 sangat buruk, dengan skor keseluruhan hanya 9 dari 100, yang menandakan bahwa negara ini tergolong not free atau tidak bebas. Skor tersebut dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama, Hambatan Akses mendapatkan skor 2 dari 25, menunjukkan bahwa banyak pengguna internet di Myanmar menghadapi kesulitan besar dalam mengakses internet, dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kedua, Pembatasan Konten memperoleh skor 5 dari 35, yang menunjukkan adanya sensor masif terhadap konten online, di mana banyak informasi yang dibatasi atau dihapus, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Terakhir, Pelanggaran Hak Pengguna mencatat skor 2 dari 40, yang menggambarkan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak individu, seperti pemantauan online dan penahanan bagi mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kontrol ketat militer Myanmar terhadap internet dan informasi, dengan pembatasan yang sangat mengurangi kebebasan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi secara bebas (Freedom House, 2024).

Bentuk Propaganda dan Kontrol Media



Gambar 2. Pamflet Propaganda
(Sumber: Centre for Information Resilience)

Sejak April 2021, tersebar sejumlah pamflet propaganda di wilayah-wilayah resistensi seperti Yangon, Sagaing, Magway, Chin dan Kachin. Secara teknis, pamflet disebarakan melalui dua cara, yakni dibagikan langsung oleh aparat (atau orang berpakaian sipil) di kota-kota, dan dijatuhkan dari pesawat atau helikopter di daerah pegunungan yang sulit diakses dan menjadi basis perlawanan, seperti Sagaing dan Chin. Pamflet-pamflet ini menyebarkan narasi kelompok oposisi (seperti National Unity Government / NUG) dan kelompok bersenjata rakyat (People's Defence Force / PDF) digambarkan sebagai “teroris”, pengkhianat atau bagian dari perdagangan narkoba, serta disertai ancaman terhadap warga yang mendukung mereka. Kemungkinan pamflet tersebut berasal dari satu sumber pro-rezim yang sama dan menjadi bagian dari strategi untuk mengontrol narasi publik di tengah konflik dan pemadaman internet. Distribusinya kadang dilakukan bertepatan dengan pemadaman internet di wilayah tersebut, sehingga warga tidak dapat

mengecek aktualitas dari narasi tersebut (Resilience, 2024). Selain itu, media juga memainkan peran sentral dalam propaganda yang disusun oleh rezim militer untuk membentuk opini publik dan menekan adanya perbedaan pendapat. Pertama, Myawaddy TV (MWD), stasiun televisi yang dimiliki dan dijalankan oleh angkatan bersenjata Myanmar, digunakan secara langsung sebagai instrumen “*information-combat*” oleh pihak militer. Misalnya, setelah kudeta 1 Februari 2021, Myawaddy TV menyiarkan narasi militer bahwa pengambilalihan kekuasaan dilakukan demi “menyelamatkan negara” dari kecurangan pemilu, sambil melabelkan para demonstran dan aktivis sebagai “pengkhianat” atau “teroris” (Potkin & Lone, 2021).

Lalu, surat kabar resmi pemerintah seperti New Light of Myanmar (NLM) berfungsi sebagai corong narasi negara dan militer. Sejak masa rezim militer dahulu, NLM telah dibebankan tugas untuk menerbitkan agenda pro-pemerintah dan meminimalkan berita yang menempatkan militer dalam posisi negatif. Terdapat pula surat kabar resmi pemerintah seperti New Light of Myanmar (NLM) berfungsi sebagai corong narasi negara dan militer. Sejak masa rezim militer dahulu, NLM telah dibebankan tugas untuk menerbitkan agenda pro-pemerintah dan meminimalkan berita yang menempatkan militer dalam posisi negatif. Kemudian, terdapat perusahaan media swasta yang sangat dekat dengan rezim militer, turut memainkan peran penting dalam memperkuat propaganda. Forever Group adalah mitra utama di sektor penyiaran komersial bersama pemerintah dan diketahui mengorganisasi kampanye film, konser, dan program hiburan yang secara tersirat. Rezim memanfaatkan perusahaan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari perlawanan bersenjata, melalui produksi film, konser besar, serial televisi, dan program hiburan yang menormalisasi kekuasaan militer serta menggambarkan aparat keamanan sebagai pahlawan. Selain itu, perusahaan ini mendapat keuntungan bisnis besar dari hubungan erat dengan militer dan telah diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan yang membuat iklan, hiburan dan konten media yang menarasikan citra rezim (Irrawaddy, 2022).

Situasi Kebebasan Pers di Myanmar Pasca Kudeta

INDEX 2025		INDEX 2024	
169 /180 Score: 25.32		171 /180 Score: 24.41	
POLITICAL INDIKATOR	156 23.99	POLITICAL INDIKATOR	158 22.17
ECONOMIC INDIKATOR	143 32.28	ECONOMIC INDIKATOR	157 31.67
LEGISLATIVE INDIKATOR	173 18.55	LEGISLATIVE INDIKATOR	177 18.75
SOCIAL INDIKATOR	150 36.04	SOCIAL INDIKATOR	164 30.00
SECURITY INDIKATOR	176 15.64	SECURITY INDIKATOR	177 19.48

Gambar 3. (Sumber: *Reporters Without Borders*, 2025)

Junta militer melakukan pembungkaman sekaligus pelarangan pada sejumlah media independen, termasuk *Democratic Voice of Burma* yang selama ini bergerak menjadi simbol perjuangan kebebasan pers. Banyak media terpaksa menggunakan teknik pelaporan dengan sembunyi sama seperti masa kediktatoran sebelumnya, demi menyampaikan informasi berbasis kebenaran dan dapat dipercaya. Kemudian junta menghidupkan kembali sistem sensor pra-publikasi dan melarang media meliput pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Bahkan kerangka hukum yang tertuang dijadikan alat utama untuk menekan kebebasan pers. Junta sering menggunakan Pasal 505 (a) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki definisi mengenai “informasi palsu” dan dapat dihukum penjara tiga tahun. Selain itu, terdapat pula Pasal 66 (d) dari undang-undang telekomunikasi yang juga digunakan untuk mengkriminalisasi pencemaran nama baik, di mana sangat memungkinkan untuk jurnalis dipenjara jika ada pihak yang keberatan dengan laporan mereka. Mirisnya, ekonomi media swasta Myanmar juga terlampaui sangat rapuh sebelum kudeta terjadi, ditunjukkan dengan bukti pembaca yang terbatas terhadap media, seperti *Myanmar Now* dan *Mizzima*. Setelah kudeta, media pro-pemerintah mengambil alih kios-kios berita dan saluran udara, sementara media independen terpaksa bekerja dalam kondisi sembunyi-sembunyi dengan sumber pembiayaan yang semakin tidak pasti dan terbatas. Pada awal 2022, junta memperkenalkan pajak baru pada layanan

internet, termasuk kartu SIM, yang bertujuan mempersempit akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi daring (Reporters Without Borders, 2025).

Negara ini menjadi salah satu pemenjara jurnalis terbesar di dunia, kedua setelah Tiongkok, dan menempati posisi pertama secara proporsional berdasarkan populasi (CPJ, 2023). Kondisi penjara di Myanmar sangat keras, dengan laporan yang menunjukkan adanya penyiksaan sistematis. Dalam beberapa kasus, kekerasan tersebut bahkan mengakibatkan kematian jurnalis, menambah panjang daftar korban yang tewas di tangan junta militer (Naing & Ratcliffe, 2024). Tahun 2024 menjadi salah satu tahun paling mematikan bagi jurnalis di Myanmar sejak kudeta militer pada 2021. Dalam periode ini, tiga jurnalis tewas dalam waktu satu bulan, menambah jumlah korban menjadi empat dalam setahun. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bagaimana junta militer meningkatkan intensitas kampanye terornya terhadap kebebasan pers. Sejak kudeta 2021, Myanmar telah menjadi salah satu negara paling represif bagi jurnalis. Penahanan sering disertai dengan tindakan penyiksaan, dan hukuman berat dijatuhkan melalui undang-undang anti-terorisme yang dimanipulasi oleh junta. Kekerasan terhadap jurnalis semakin meningkat, dengan hukuman berat dan pembunuhan menjadi alat junta untuk membungkam suara independen (Naing & Ratcliffe, 2024). Jurnalis Myanmar seringkali digambarkan sebagai “The Oxygen of the Ongoing Movement”. Dalam hampir empat tahun terakhir, setidaknya banyaknya jurnalis tewas, dipenjara, dan ribuan lainnya terpaksa melarikan diri ke wilayah yang dikuasai pasukan perlawanan atau ke luar negeri (Bhattacharyya, 2024).

Kasus Tindakan Pembatasan Media Pers dan Jurnalis

Tabel 1. Jumlah Kasus Jurnalis

	Ditahan	Dibunuh
2021	88	2
2022	90	2
2023	75	0
2024	66	3
2025	55	0

(Sumber: *Reporters Without Borders*, 2025)

Beranjak pada dua tahun setelah kejadian kudeta militer Myanmar, kondisi jurnalisme semakin menunjukkan gambaran yang sangat suram. Lebih dari 130 jurnalis telah ditangkap, dengan puluhan masih mendekam di penjara dan tujuh jurnalis telah kehilangan nyawa, termasuk dua di antaranya saat berada dalam tahanan. Media independen mengalami tantangan berkepanjangan, termasuk ancaman penutupan paksa dan penyensoran ketat oleh junta. Para jurnalis yang tetap melaporkan situasi harus menghadapi risiko ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Salah satu kasus menimpa jurnalis VOA, yaitu Sithu Aung Myint dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan kerja paksa, hanya karena dianggap mendiskreditkan militer. Tuduhan semacam ini menjadi pola umum yang digunakan junta untuk membungkam media. Menurut militer Myanmar melalui juru bicara Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengungkapkan bahwa penangkapan jurnalis dilakukan karena melakukan tindakan pelanggaran hukum, bukan karena laporan mereka yang sesuai dengan Pasal 505(a). Sebagian besar media di Myanmar kini berubah menjadi corong propaganda pemerintah, sehingga kehilangan kredibilitas di mata publik. Jurnalisme independen terpaksa beroperasi secara diam-diam dengan sumber daya yang sangat terbatas. Akibatnya, kualitas berita menurun drastis, dan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang sesuai fakta semakin kecil (Spencer, 2025).

Tabel 2. Jumlah Kasus Jurnalis

	Ditahan	Dihukum	Dibebaskan
2021	155	22	102
2022	48	43	27
2023	17	13	27
2024	11	10	22
2025	3	3	5

From February 2021 to July 2025
(Sumber: International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), 2025)

Berdasarkan laporan pernyataan ICNL bahwa 223 jurnalis telah ditahan selama empat tahun terakhir, termasuk jurnalis perempuan dari hampir 100 media lokal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 jurnalis dibebaskan setelah rata-rata menjalani hukuman enam bulan penjara, sementara hingga Juli 2025 49 lainnya masih berada di balik jeruji. Ironisnya, tiga jurnalis dilaporkan meninggal dunia saat melakukan penahanan oleh junta militer. Junta militer tidak hanya menggunakan kekuatan represif fisik untuk membungkam media tetapi juga memanfaatkan berbagai perangkat hukum pasal untuk menekan kebebasan pers. Laporan ICNL juga menunjukkan bahwa 160 jurnalis didakwa dengan berbagai kejahatan berdasarkan sembilan undang-undang, termasuk tuduhan "menghasut" dan menyebarkan "false news." Pengadilan junta yang penuh manipulasi mengabaikan proses hukum yang adil dan menjatuhkan hukuman penjara hingga 20 tahun (Spencer, 2025).

Pada September, dua jurnalis Myanmar, yaitu Tar Lin Maung dari Red News Agency dan Naung Yo, seorang jurnalis lepas dilaporkan ditahan oleh *Ethnic Armed Organisation* (EOA) kelompok oposisi terkenal, yaitu *Kachin Independence Army* (KIA), di wilayah Hpakant, Negara Bagian Kachin, Myanmar Utara. Hingga kini, keberadaan maupun kondisi mereka belum diketahui. (IFJ, 2023). Kemudian kasus menimpa Sai Zaw Thaike yang merupakan seorang jurnalis foto Myanmar tengah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Hukuman ini diberikan atas peliputannya terkait dampak bencana topan Mocha, salah satu badai paling destruktif di Myanmar dalam satu dekade terakhir. Vonis ini menjadi salah satu hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan kepada seorang jurnalis sejak kudeta militer pada Februari 2021. Sai Zaw Thaike didakwa dengan sejumlah tuduhan, termasuk penghasutan, penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hukum manajemen bencana alam. Tuduhan-tuduhan tersebut membawa ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara (Guardian, 2023).

Tak hanya itu, nasib yang sama dialami oleh dua jurnalis yang berasal dari media *Dawei Watch*, yaitu ung San Oo dan Myo Myint Oo ditangkap. Penangkapan dilakukan hanya tiga hari setelah mereka kembali dari persembunyian, yang mengindikasikan bahwa keamanan mereka terus berada dalam ancaman meskipun sudah menghindari perhatian publik yang ramai (Peck,

2023). Pe Maung Sein ditangkap pada Mei 2022 saat sedang mendokumentasikan konflik dan kondisi warga yang mengungsi di dekat perbatasan Thailand. Selama di pusat interogasi, ia disiksa secara brutal hingga mengalami lima tulang rusuk patah, empat cakram tulang belakang menonjol, dan berbagai cedera lainnya (Naing & Ratcliffe, 2024). Kasus-kasus pembunuhan jurnalis di Myanmar menunjukkan betapa sangat keji dan menyedihkan atas kondisi kebebasan pers di negara tersebut. Semakin lama, keamanan para jurnalis terus menerus berada dalam kecaman bahkan laporan yang ditulis oleh

jurnalis masih dalam batasan dan sepenuhnya berpegang pada etik jurnalistik. Sebagai bagian dari upaya membungkam kritik dari suara para jurnalis, junta militer menggunakan undang-undang yang manipulatif untuk menekan jurnalis. Pada dasarnya menulis informasi berita bukanlah suatu tindakan kriminal yang bertindak berlebihan hingga menahan sekaligus menginterogasi jurnalis layaknya penjahat merupakan suatu pelanggaran dalam kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru dienyahkan, meninggalkan masyarakat dalam keadaan buta akan informasi.

Tabel 3. Daftar Jumlah Pembatasan Media Lokal dan Nasional

Nama Media	Jenis Media	Tahun Pelarangan/Pencabutan	Status
Democratic Voice of Burma (DVB)	TV, Online	2021	Dicabut
Myanmar Now	Online News	2021	Dicabut
Mizzima News	TV, Online	2021	Dicabut
Khit Thit Media (Khit Khit)	Online	2021	Dicabut
7Day News	Media Cetak dan Online	2021	Dicabut
The 74 Media	Regional (Kachin)	2021	Dilarang
Myitkyina News Journal	Media Cetak Lokal (Kachin)	2021	Dihentikan
Tachileik News Agency (TNA)	Regional (Shan)	2021	Dilarang
Zayar Times News Agency	News Agency Regional (Sagaing)	2021	Dilarang
Delta News	News Agency	2021	Dilarang
Kantarawaddy Times	News Agency (Kayah/Karen)	2021	Dilarang

Independent Mon News Agency	News Agency	2021	Dilarang
The Irrawaddy	Online, Internasional	2022	Dicabut
Ayeyarwaddy Times	Online News	2023	Dicabut
Mekong News	Media Lokal (Shan)	2023	Dicabut
Frontier Myanmar	Majalah, Online	2021-2025	Tidak dicabut, tetapi dibatasi
Bago Weekly Journal	Cetak Regional	2021-2024	Dihentikan secara paksa
Kaung Thit Media	Online lokal	2022-2024	Ditutup paksa

(Sumber: Data diolah oleh penulis)

Serangan masif terhadap kebebasan pers semakin intensif dengan penutupan lima media independen besar, yaitu *7Day News*, *Myanmar Now*, *Mizzima*, *DVB*, dan *Khit Thit Media*, pada Maret 2021. Selain itu, junta menyerbu kantor beberapa media di Yangon, menangkap para jurnalis, dan mencabut izin publikasi tanpa memberikan alasan pasti. Salah satu kasus paling mencolok adalah penutupan *The Irrawaddy*. Pada Oktober 2022, junta secara resmi mencabut izin media tersebut setelah sebelumnya melakukan penggerebekan di kantornya dan menangkap penerbitnya, yakni U Thaug Win yang hingga saat ini masih dalam penahanan. Bahkan, situs web *The Irrawaddy* telah diblokir di Myanmar sebelum penutupan resminya (Thit & Nyo, 2024). Penindasan kemudian meluas ke level regional, seperti 74 Media di Kachin dan Tachileik News Agency di

Shan yang dilarang beroperasi pada Mei 2021 (ANFREL, 2021). Pada 2023, tindakan kontrol pembatasan media berlanjut dengan pencabutan lisensi Ayeyarwaddy Times, yang dituduh melanggar Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan (CPJ, 2023; IFJ, 2023). Di sisi lain, beberapa media seperti Frontier Myanmar tidak dicabut secara resmi tetapi tetap dibatasi melalui penggerebekan kantor dan penangkapan jurnalis (D. Aung, 2022). Media lokal seperti Bago Weekly Journal dan Kaung Thit Media juga terpaksa menghentikan operasi akibat tekanan administratif, pemblokiran situs, serta kriminalisasi terhadap stafnya (Myanmar Election Watch, 2023; Project, 2024). Rangkaian pembatasan ini menunjukkan pola kontrol negara terhadap kebebasan pers, baik media nasional maupun media lokal berbasis daerah.

Tabel 4. Daftar Pembatasan Media dan Pers Lainnya

	Tahun	Bentuk Pembatasan
Penangkapan Jurnalis Danny Fenster (Jurnalis Amerika)	2021	Ditahan saat hendak naik pesawat dari Yangon dan dituduh menyebarkan berita palsu.
Beberapa media asing, seperti BBC, NHK, dan CNN	2021	Diblokir atau saluran satelitnya dilarang dan akses mereka sangat dibatasi.
Robert Bociaga (Fotografer Polandia)	2021	Ditangkap saat meliput protes di Shan State, kemudian dideportasi.

**Kontrol Negara Otoritarian Atas Media: Pembatasan Kebebasan Pers di Myanmar
Pasca Kudeta Militer (Hassya Talitha Nur Mahsa, Aswin Ariyanto Azis)**

Nathan Maung (Amerika Serikat)	2021	Jurnalis asing yang ditahan setelah kantor media mereka diserbu, lalu dibebaskan dan dideportasi.
Yuki Kitazumi (Video-Reporter Jepang)	2022	Ditangkap saat meliput protes dan dideportasi.
Media/jurnalis asing yang hendak meliput gempa besar di Myanmar	2025	Masuk ke dalam wilayah terdampak yang dilarang oleh junta dan akses. dibatasi.

(Sumber: Data diolah oleh Penulis)

Selain itu, berbagai bentuk pembatasan terhadap media asing dan jurnalis internasional sejak dan pasca kudeta Myanmar 2021. Pada 2021, jurnalis Amerika Danny Fenster ditangkap saat hendak meninggalkan Yangon dan didakwa dengan tuduhan penyebaran berita palsu, sebuah langkah yang secara jelas menargetkan peliputan internasional mengenai situasi politik Myanmar. Pada tahun yang sama, akses terhadap media asing seperti BBC, NHK, dan CNN juga diblokir melalui pelarangan penggunaan televisi satelit, yang secara efektif memutus masyarakat Myanmar dari sumber berita internasional yang independen (Human Rights Watch, 2021). Selain itu, fotografer asal Polandia Robert Bociaga ditangkap ketika meliput protes di Shan State dan kemudian dideportasi, menunjukkan bahwa jurnalis asing di lapangan diperlakukan sebagai ancaman oleh otoritas militer (Nachemson, 2021). Penangkapan serupa juga menimpa Nathan Maung, jurnalis Amerika yang ditahan setelah kantor medianya diserbu dan kemudian dipulangkan ke negaranya (AP News, 2025). Pada 2022, video-reporter Jepang Yuki Kitazumi turut ditangkap saat melaporkan aksi demonstrasi sebelum akhirnya dideportasi, menandakan konsistensi rezim dalam menargetkan jurnalis. Hal unik dari kasus Myanmar menunjukkan adanya fenomena bagaimana setelah media dan pers masif direpresi dan dibatasi, akses informasi tetap diupayakan mengalir oleh warga melalui media-media independen yang bahkan tidak memiliki struktur institusi melalui media sosial; yang walau demikian juga mengalami represifitas dan restriksi pada akhirnya. Hingga 2025, pola kontrol pembatasan ini berlanjut ketika media dan jurnalis asing dilarang memasuki wilayah terdampak gempa

besar, menghalangi komunitas internasional untuk memperoleh informasi langsung mengenai kondisi kemanusiaan di (NDTV, 2025). Keseluruhan tindakan tersebut memperlihatkan strategi junta untuk meminimalkan sorotan global, membatasi aliran informasi independen.

Respon Masyarakat Terhadap Tindakan Represi Kepada Media dan Pers

Meskipun ruang informasi dipersempit secara ekstrem melalui pemblokiran media, kriminalisasi jurnalis, pemutusan internet, dan sensor digital, akan tetapi masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menjaga aliran informasi tetap terhubung. Ketika akses publik terhadap media dan berita independen dibatasi, warga justru menjadi pelaku informasi melalui peran *Citizen Journalist*, baik secara spontan maupun terstruktur. Mereka merekam aksi kekerasan, pergerakan militer, hingga kondisi kemanusiaan di wilayah konflik, lalu menyalurkannya melalui media sosial (T. Aung, 2023).

Rezim pun menyadari bahwa kebisuan publik adalah prasyarat bagi otoritarianisme, terlihat dari penutupan 19 media. penangkapan hampir 200 jurnalis, dan banyaknya jurnalis yang dijatuhi hukuman. Dalam konteks ini, banyak jurnalis warga yang beroperasi tanpa nama, tanpa upah, tanpa perlindungan, namun menghadapi risiko yang sama besarnya dengan jurnalis profesional, bahkan lebih besar. Terhitung lebih dari 10 jurnalis warga yang bekerja untuk media DVB ditangkap sejak kudeta. Uniknya, penindasan terhadap jurnalis menimbulkan paradoks penting, seolah-olah menjelaskan “semakin represif junta menekan jurnalis profesional, maka semakin besar pula minat masyarakat untuk terlibat dalam *citizen journalism*”. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah pendaftar pelatihan jurnalis pada media DVB. Mulanya, sebelum kudeta pendaftar hanya sekitar 40-50 orang, namun setelah kudeta menjadi lebih dari 100 orang per sesi, meskipun pelatihan

hanya dibuka bagi 25 peserta saja. Pimpinan media The Irrawaddy juga mengungkapkan bahwa redaksinya telah melatih lebih dari 100 orang (Nyein, 2024).

Selain itu, masyarakat juga melakukan perlawanan secara digital melalui tagar *#WhatsHappeningInMyanmar* memanfaatkan media sosial Twitter. Unsur cuitan mengandung ekspresi keluhan terhadap represi, diseminasi informasi untuk melawan sensor, upaya menarik dukungan internasional, dan mobilisasi gerakan untuk pengamanan diri serta koordinasi aksi. Narasi tersebut berfungsi sebagai *counter-narratives* yang secara langsung melawan kontrol negara atas informasi, membongkar propaganda junta, menjaga ritme diskusi publik meskipun internet diputus, dan menyebarkan taktik perlindungan diri terhadap pengawasan digital dan fisik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa ruang digital Myanmar menjadi arena kontestasi kekuasaan dua arah, di mana negara berupaya menguasai narasi melalui manipulasi digital, sensor, dan pengawasan, sedangkan masyarakat justru membangun solidaritas lintas negara dan menghasilkan aktivisme transnasional (Phattharathanasut, 2024).

Pembatasan Kebebasan Pers Sebagai Karakteristik Otoritarianisme

Di sisi lain, media sosial juga menjadi medan pertempuran baru di mana propaganda militer menyebarkan narasi xenofobia, nasionalisme ekstrem, dan kebencian berbasis agama. Dalam konteks ini, otoritarianisme menunjukkan bagaimana propaganda digunakan untuk membentuk opini publik dan menjustifikasi tindakan represif. Kudeta ini juga menyoroti bagaimana otoritarianisme sering kali menggunakan taktik populis sayap kanan untuk memperkuat kekuasaan (Khine, 2021). Internet yang awalnya dianggap sebagai ruang kebebasan berubah menjadi alat represi terutama di bawah rezim otoritarian. Myanmar dengan kontrol ketat terhadap ruang digital dilakukan melalui pemutusan komunikasi, penyensoran, dan pengawasan terhadap warganya. Junta menggunakan berbagai strategi untuk memperketat kontrol terhadap ruang digital, seperti penutupan akses internet, pengawasan media sosial, dan propaganda online menjadi bagian dari

strategi junta untuk menghilangkan narasi oposisi. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik otoritarianisme digital, di mana rezim memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kekuasaan dengan mengontrol aliran informasi. Namun, masyarakat dan aktivis lokal tidak hanya berdiam saja, tetapi juga meluncurkan kampanye digital dengan penggunaan tagar *#WhatsHappeningInMyanmar* sebagai upaya perlawanan untuk melawan narasi junta, menyebarkan informasi, dan menarik perhatian dunia internasional (Phattharathanasut, 2024).

Setelah kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, negara tersebut berubah menjadi sebuah rezim otoriter yang sangat mengekang kebebasan rakyatnya. Kontrol ketat dan tindakan represif menjadi salah satu cara utama yang digunakan untuk menekan perlawanan. Banyak tindakan yang seringkali berlawanan dengan kebebasan guna menjaga "keamanan nasional." Militer juga menggunakan undang-undang untuk mengekang kebebasan berbicara, seperti Pasal 505(a), yang bisa memenjarakan siapa saja yang dianggap menyebarkan "informasi palsu." Hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan bukan untuk melindungi masyarakat, tapi justru untuk mengendalikan mereka. Kontrol negara atas media di Myanmar semakin intens dengan menggunakan berbagai cara untuk membungkam media independen dan memastikan hanya narasi yang mendukung mereka yang terdengar. Salah satu cara utama yang digunakan adalah dengan menutup atau mencabut izin media yang kritis terhadap pemerintah, seperti DVB, Myanmar Now, Mizzima, dan media lainnya.

Media yang tetap ada dipaksa untuk mematuhi arahan pemerintah, dibatasi, dan jika melanggar, mereka menghadapi ancaman penutupan atau hukuman terhadap media serta jurnalisnya. Selain itu, pengendalian informasi dilakukan dengan cara membatasi akses ke internet dan media sosial. Mereka memblokir platform seperti WhatsApp, X, dan Instagram, serta menutup situs web yang dianggap mengancam kontrol mereka. Pembatasan ini menyulitkan masyarakat untuk mengakses berita dari luar kendali pemerintah. Bahkan, militer meluncurkan saluran media baru, seperti MTube, yang dikelola oleh negara untuk menyebarkan propaganda. Militer juga membatasi akses media internasional dengan menutup saluran berita asing dan menangkap jurnalis asing yang mencoba meliput situasi di Myanmar. Semua langkah ini

menunjukkan bahwa militer berusaha menutupi kenyataan dan mengendalikan persepsi publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan membatasi informasi dan menggunakan kekerasan terhadap jurnalis, militer Myanmar berhasil menciptakan suasana di mana kebebasan pers sangat terancam, dan masyarakat pun semakin sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Hegemoni Kekuasaan Militer dalam Mengontrol Media Pers dan Jurnalis

Rezim militer Myanmar menggunakan perangkat ideologis dan represif negara untuk mengukuhkan hegemoni. Militer juga mengambil alih media negara dan menutup media independen. Hegemoni penguasa tercapai melalui kombinasi represi langsung, seperti penangkapan jurnalis dan pembatasan akses internet, serta manipulasi ideologi lewat propaganda yang menyebarkan narasi pro-rezim. Akibatnya, media independen tidak hanya menghadapi kendala struktural tetapi juga intimidasi langsung yang membahayakan kebebasan pers (Khine, 2021). Strategi junta tersebut memperkuat legitimasi mereka di tengah masyarakat yang cenderung mengutamakan stabilitas dibandingkan demokrasi. Dominasi militer ini semakin kuat dengan manipulasi narasi yang menjustifikasi tindakan represif sebagai upaya melindungi negara. Meskipun demikian, muncul perlawanan terhadap hegemoni militer melalui media alternatif dan jurnalisisme. Media ini berperan penting dalam menyampaikan narasi kontra-hegemonik yang mencerminkan aspirasi masyarakat Myanmar untuk kebebasan dan demokrasi.

Pembatasan kebebasan pers di Myanmar pasca-kudeta militer 2021 dapat dipahami melalui lensa teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menekankan dominasi tidak hanya melalui paksaan tetapi juga konsensus ideologis. Junta militer Myanmar menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam media independen, menangkap jurnalis, dan menyebarkan propaganda pro-rezim, menciptakan tatanan yang tampak natural di mata masyarakat. Strategi ini meliputi penggunaan propaganda yang menjustifikasi kekuasaan mereka sebagai upaya "melindungi negara," serta manipulasi

narasi yang menggambarkan lawan-lawan mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana hegemoni bekerja dalam konteks otoritarianisme digital di Myanmar, di mana junta militer memanfaatkan teknologi untuk mengawasi, menyensor, dan mengontrol narasi publik. Kondisi Myanmar menunjukkan bahwa meskipun rezim otoriter berupaya mempertahankan kekuasaannya melalui dominasi ideologis dan koersif. Junta militer Myanmar membangun hegemoni melalui kontrol narasi media dengan mempromosikan gagasan bahwa kudeta diperlukan untuk menyelamatkan negara dari "ketidakstabilan politik" akibat dugaan kecurangan pemilu. Media negara digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan junta dengan menonjolkan retorika stabilitas dan nasionalisme, sementara segala bentuk oposisi dilabeli sebagai penghasut atau ancaman bagi persatuan nasional.

Ketika dominasi ideologis tidak cukup, junta militer mengandalkan kekuatan koersif yang terlihat dari penangkapan ratusan jurnalis yang disiksa dan diberi hukuman berat, penutupan media independen, dan otoritarianisme digital yang menghempas narasi kontra terhadap rezim. Ketika penguasa mulai kehilangan kontrolnya, maka harus mengandalkan kekuatan koersif dengan menyetujui kebijakan represif. Seperti pasal 505(a) untuk mempertahankan legitimasi yang berkurang di mata masyarakat Myanmar. Junta militer di Myanmar memanfaatkan pembatasan kebebasan pers sebagai bagian dari strategi hegemoni untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan mengendalikan media mereka berusaha membangun dominasi ideologis sambil menggunakan koersi untuk menutupi kelemahan legitimasi. Namun, resistensi melalui media alternatif dan dukungan internasional yang disertai perlawanan masyarakat dengan tagar #WhatsHappeningInMyanmar menunjukkan bahwa hegemoni junta tergolong rapuh dan bergantung pada kekuatan koersif untuk bertahan.

Dalam hal ini, militer mengandalkan kekuatan negara melalui kontrol terhadap "masyarakat sipil" dan "masyarakat politik", dua elemen yang menurut Gramsci saling berinteraksi dalam membangun hegemoni. Masyarakat sipil, yang mencakup media dan organisasi, berfungsi sebagai medan utama bagi ideologi dan budaya dominan, sementara negara menggunakan kekuatan fisik melalui militer, polisi, dan hukum untuk menjaga ketertiban dan menghukum mereka yang tidak setuju. Hegemoni ini berusaha

membangun persetujuan masyarakat, meski pada kenyataannya banyak warga yang menentang. Berbagai bentuk perlawanan, seperti protes jalanan dan mogok kerja, menunjukkan adanya ketidaksetujuan yang meluas, namun pihak militer tetap menggunakan kontrol kuasa yang bersifat koersif dan represif untuk mempertahankan kekuasaan mereka, mengingat semakin sulitnya mendapatkan persetujuan secara sukarela.

SIMPULAN

Pembatasan kebebasan pers di Myanmar pasca kudeta militer 2021 merupakan manifestasi dari praktik kekuasaan dalam kerangka otoritarianisme dan hegemoni. Otoritarianisme sendiri menjelaskan bahwa dalam situasi yang dianggap mengancam stabilitas, seperti protes rakyat dan meningkatnya kritik terhadap rezim, pemerintah otoriter akan memperkuat kontrol sosial melalui tindakan koersif dan represif. Hal ini tampak jelas pada tindakan junta militer Myanmar yang tidak hanya menahan jurnalis, tetapi juga memblokir akses terhadap internet, membatasi media independen. Dalam konteks ini, tindakan represif terhadap media bukanlah tindakan insidental, melainkan bagian dari logika dasar rezim otoriter dalam menghadapi ancaman terhadap kekuasaannya. Sementara itu, teori hegemoni Gramsci menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dijalankan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui pembentukan konsensus ideologis. Junta militer Myanmar memanfaatkan media pro-pemerintah dan propaganda sistematis untuk membangun legitimasi atas kudeta, memanipulasi narasi publik, serta menyebarkan persepsi bahwa tindakan militer dilakukan demi menjaga stabilitas nasional. Pengendalian terhadap institusi media, pemaksaan narasi tunggal, serta delegitimasi suara oposisi merupakan strategi hegemoni yang menyatu dengan represi fisik.

Ketika hegemoni ideologis gagal membentuk konsensus yang kuat, maka rezim mengandalkan kekuatan koersif untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kasus Myanmar, pembungkaman media dan kriminalisasi jurnalis adalah upaya untuk menutup ruang kritik dan menegaskan

dominasi total, baik melalui paksaan maupun melalui konstruksi wacana. Dengan demikian, analisis otoritarianisme dan hegemoni mengungkap bahwa pembatasan kebebasan pers di Myanmar bukan sekadar pelanggaran, tetapi merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang sistematis untuk mempertahankan kontrol politik dan ideologis atas masyarakat. Situasi ini menegaskan bahwa dalam rezim otoriter modern, represi terhadap pers tidak hanya menjadi alat untuk menekan lawan politik, tetapi juga untuk menciptakan ilusi stabilitas dan legitimasi yang dibangun di atas narasi yang terkontrol sepihak.

Hal unik dari kasus Myanmar menunjukkan bahwa meskipun media dan pers direpresi secara masif melalui penutupan media independen, kriminalisasi jurnalis, pemadaman internet, hingga pembatasan akses VPN, aliran informasi tetap berusaha dipertahankan oleh masyarakat melalui kanal alternatif seperti media sosial dan jaringan jurnalisisme warga yang tidak memiliki struktur institusional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media dan pers menjadi bagian penting dari perlawanan politik dalam mempertahankan ruang publik yang berusaha dibungkam oleh rezim. Namun ruang alternatif tersebut pada akhirnya juga menjadi target represi lanjutan, karena keheningan dan ketiadaan informasi merupakan elemen penting bagi keberlangsungan otoritarianisme. Rezim berusaha mengisi celah-celah tersebut melalui hegemoni, yaitu bukan hanya dengan represi fisik, tetapi juga melalui dominasi ideologis yang perlahan membingkai narasi mengenai stabilitas, keamanan, dan ancaman eksternal. Upaya rezim dilakukan melalui kontrol, sehingga propaganda tampak sebagai kebenaran alamiah dan tindakan represif terlihat sebagai langkah “demi kebaikan bersama”. Dengan demikian, kasus Myanmar menegaskan bahwa dalam rezim otoritarian, akses informasi akan selalu menemukan berbagai celah untuk menyebar, tetapi rezim akan terus berupaya menutup setiap celah tersebut melalui pembatasan dan hegemoni ideologis guna mempertahankan dominasi dan menciptakan ilusi stabilitas serta strategi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANFREL. (2021). Myanmar Situation Update (26 April to 2 May 2021). In *ANFREL*. <https://anfrel.org/myanmar-situation-update-26-april-to-2-may-2021/>
- AP News. (2025, April 17). *Myanmar frees nearly*

- 4,900 prisoners including some political detainees. AP News. <https://apnews.com/article/myanmar-amnesty-prisoners-min-aung-hlaing-new-year-c33b3af152a41f42fa01631150a42a6d>
- Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8503>
- Aung, D. (2022). Analysis | How the Coup Split Myanmar's Media Landscape (Published Dec. 2022). In *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/how-the-coup-split-myanmars-media-landscape.html?>
- Aung, T. (2023). *Dying to tell a story: the role of Citizen Journalists in Myanmar*.
- Bahri, S. (2022). Civil Disobedience Movement (CDM) Sebagai Gerakan Resistansi Rakyat Myanmar Terhadap Kudeta Militer Tahun 2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10).
- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2708933>
- Bhattacharyya, R. (2024). *Myanmar's Braveheart Journalists Persist Amid Immense Pressure*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/11/myanmars-braveheart-journalists-persist-amid-immense-pressure/>
- CPJ. (2023). Myanmar military revokes media license of Ayeyarwaddy Times - Committee to Protect Journalists. In *Committee to Protect Journalists*. <https://cpj.org/2023/06/myanmar-military-revokes-media-license-of-ayeyarwaddy-times/>
- Feldman, S., & Stenner, K. (1997). Perceived Threat and Authoritarianism. *Political Psychology*, 18(4), 741–770. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00077>
- Firnas, M. A., & Rizky, K. (2023). Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer dan Peran Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 600. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.10>
- Freedom House. (2024). *Myanmar: Freedom on the Net 2024 Country Report*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2024>
- Guardian, T. (2023). *Myanmar journalist jailed for 20 years for cyclone coverage*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/07/myanmar-journalist-jailed-for-20-years-for-cyclone-coverage>
- Gunawan, Y., Amirullah, M. N. R., Permana, V. G. P., & Arumbinang, M. H. (2021). Freedom of Speech Under International Law: Myanmar's Anti-Coup Demonstration Violence Case. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.414>
- Human Rights Watch. (2021). *Myanmar: Junta Escalates Media Crackdown*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2021/07/27/myanmar-junta-escalates-media-crackdown>
- IFJ. (2023). *Myanmar: Junta revokes Ayeyarwaddy license*. International Federation of Journalists. <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/myanmar-junta-revokes-ayeyarwaddy-license>
- Indrasari, A. F. P., Taufik Muhammad Ramadhan, & Prilla Marsingga. (2023). Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021. *Journal of Integrative International Relations*, 8(2), 98–114. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.2.98-114>
- Irrawaddy, T. (2022). Notorious Crony Organizing Myanmar Junta Propaganda Campaigns. In *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/notorious-crony-organizing-myanmar-junta-propaganda-campaigns.html?>
- Khine, N. K. (2021). *The Repression and Erosion of Independent Media in Myanmar Since the Military Coup*. www.rosalux.de
- Linz, J. J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. In *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. <https://doi.org/10.1515/9781685850043-006>
- MT News. (2022, September 3). *YouTube-like MTube live streaming platform is in a testing stage to counter technological bullying on social media*. Myanmar Transparency News.

- <https://www.mtnewstoday.com/en/?p=103>
- Myanmar Election Watch. (2023). List of Media Outlets Whose Licenses have been revoked by the Myanmar Junta. In *Myanmar Election Watch*. <https://myanmarelectionwatch.org/en/news/list-media-outlets-myanmar-licenses-revoked-junta>
- Myanmar, I. S. P. (2022). Over 9,000 People Detained | ISP-Myanmar. In *ISP-Myanmar | Institute for Strategy and Policy – Myanmar*. <https://ispmyanmar.com/over-9000-people-detained-data-matters-no-6/>
- Nachemson, A. (2021). In 2021, Myanmar journalists risked lives to tell world of coup. In *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/29/myanmar-journalism-press-freedom?>
- Naing, A. S., & Ratcliffe, R. (2024). *Myanmar journalists facing 'terror campaign' in deadliest year for media since coup*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2024/sep/13/myanmar-journalists-facing-terror-campaign-in-deadliest-year-for-media-since-coup>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- NDTV. (2025). Myanmar Junta Blocks Entry Of International Journalists In Quake-Affected Areas. In *Ndtv.com*. <https://www.ndtv.com/world-news/myanmar-junta-blocks-entry-of-international-journalists-in-earthquake-affected-areas-8053060?>
- Novia, H. (2025). Dari Kudeta ke Krisis: Kudeta Myanmar dan Dampaknya terhadap Keamanan Manusia dan Stabilitas Regional. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 119–142.
- Nyein, N. (2024). In Myanmar, Citizen Journalism is Connecting News to Its Revolutionary Roots. In *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/in-myanmar-citizen-journalism-is-connecting-news-to-its-revolutionary-roots.html>
- Peck, G. (2023). *Editor says Myanmar authorities have arrested 2 local journalists for an online news service*. AP News. <https://apnews.com/article/myanmar-journalists-arrests-8d3dd43df3fdcf215cd23fb9cdb6d3e6>
- Phattharathanasut, T. (2024). #WhatsHappeningInMyanmar: The Evolution of the Digital Fight Against Authoritarian State Repression. *International Journal of Communication*, 18, 2224–2244.
- Potkin, F., & Lone, W. (2021). “Information combat”: Inside the fight for Myanmar’s soul. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/information-combat-inside-fight-myanmars-soul-2021-11-01/>
- Project, M. I. (2024). Examining the Situation of Digital Repression in Myanmar in 2023. In *Myanmar Internet*. https://www.myanmarinternet.info/post/blog_014-1?
- Reporters Without Borders. (2022). Japanese video reporter arrested in Myanmar after covering protest. In *Rsf.org*. <https://rsf.org/en/japanese-video-reporter-arrested-myanmar-after-covering-protest?>
- Reporters Without Borders. (2025). *Myanmar*. Rsf.Org. <https://rsf.org/en/country/myanmar>
- Resilience, C. for I. (2024). Using Pamphlets for Propaganda. In *Centre for Information Resilience*. CIR. <https://www.info-res.org/myanmar-witness/reports/using-pamphlets-for-propaganda/>
- Spencer, O. (2025). Assessing Detentions of Journalists in Myanmar. *Incl, February 2021*.
- Susanto, G. H., Cornelis Seba, R. O., & Johan de Fretes, C. H. (2023). Analisis Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Kudeta Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 450–458. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2482>
- Thit, N., & Nyo, K. (2024). *Over 200 Myanmar Journalists Jailed Since 2021 Coup, Says Watchdog*. The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-200-myanmar-journalists-jailed-since-2021-coup-says-watchdog.html>
- Triadi, I., & Lubis, W. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Kudeta di Myanmar: Kronologi Peristiwa, Dampak Sosial-Politik, Reaksi Internasional, dan Pendekatan Hukum Internasional*. 3(2), 579–586.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1571628>

3

Yilmaz, S. (2010). State, Power, and Hegemony. *International Journal of Business and Social Science*, 1(3), 192–205.